



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025 - 2029**



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang ...



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dengan rincian sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 8. Dinas Perhubungan
 9. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 13. Dinas Sosial
 14. Dinas Tenaga Kerja
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 17. Dinas Pemuda dan Olahraga
 18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah
 19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
 21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 22. Inspektorat
 23. Badan Pengelolaan Keuangan
 24. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
 25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
 26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 27. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 28. Dinas Pariwisata
 29. Dinas Syariat Islam
 30. Dinas Pendidikan Dayah
 31. Sekretariat Daerah
 32. Kecamatan Kuta Alam
 33. Kecamatan Baiturrahman
 34. Kecamatan Meuraxa
 35. Kecamatan Syiah Kuala
 36. Kecamatan Banda Raya
 37. Kecamatan Kuta Raja
 38. Kecamatan Jaya baru
 39. Kecamatan Lueng Bata
 40. Kecamatan Ulee Kareng
 41. Sekretariat Baitul Mal
 42. Sekretariat Majelis Adat Aceh
 43. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
 44. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

(2) Masing ... 

- (2) Masing-masing dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - e. BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Desember 2025 M
12 Jumadil Akhir 1447 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Desember 2025 M
12 Jumadil Akhir 1447 H

81 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 33



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
NOMOR: 77 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2025-2029

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa visi, misi dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026, dipandang perlu untuk Renstra OPD disahkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disahkan oleh Kepala OPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Bappeda;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh;
25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistem Informasi Geografis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dengan Nomor 33 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan selama 5 tahun sejak tahun 2025-2029.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 4 Desember 2025 M
13 Jumadil Awal 1447 H

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

ROSDI, S.T, M.Si
Pembina Utama Muda/
NIP. 19680215 200112 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah SWT sehingga Dokumen Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025 - 2029 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Renstra merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan strategis jangka menengah sesuai amanah dalam Permendagri No 86 Tahun 2017. Sistematika Renstra 2025 - 2029 disusun sesuai arahan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan memuat gambaran umum pelayanan BAPPEDA, permasalahan dan isu strategis, uraian tujuan dan sasaran, serta rincian program, kegiatan, sub kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra akan menjadi panduan bagi penyusunan rencana kerja tahunan BAPPEDA.

Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja dalam upaya pencapaian target-target kinerja BAPPEDA sebagai badan perencanaan. Pada akhirnya seluruh target-target kinerja BAPPEDA selama 5 (lima) tahun tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian target-target kinerja Kota Banda Aceh seperti yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Banda Aceh.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2025 - 2029. Kritik dan saran terhadap perbaikan dokumen juga sangat kami harapkan demi perbaikan kualitas perencanaan, baik bagi BAPPEDA sendiri maupun bagi kualitas perencanaan daerah secara menyeluruh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA	6
2.1. Gambaran Pelayanan BAPPEDA.....	6
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BAPPEDA	6
2.1.2. Sumber Daya BAPPEDA	10
2.1.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA	16
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan BAPPEDA	25
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BAPPEDA	25
2.2.1. Permasalahan Pelayanan BAPPEDA.....	25
2.2.2. Isu Strategis.....	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
3.1. Tujuan Renstra BAPPEDA Tahun 2025 - 2029	29
3.2. Sasaran Renstra BAPPEDA Tahun 2025 - 2029	29
3.3. Strategi BAPPEDA	31
3.4. Arah Kebijakan BAPPEDA	31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	33

4.2. Uraian Sub Kegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	70
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran BAPPEDA 2025 -2029	71
BAB V PENUTUP	73

Lampiran : Pohon Kinerja BAPPEDA Kota Banda Aceh

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Daftar Produksi Album Peta Tematik UPTB SIG BAPPEDA Tahun 2020-2024	9
TABEL 2.2	Kondisi dan Kebutuhan Pegawai per Bidang Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Tahun 2025	11
TABEL 2.3	Sebaran Tenaga Non ASN Pada BAPPEDA Kota Banda Aceh	13
TABEL 2.4	Daftar Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	14
TABEL 2.5	Daftar Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
TABEL 2.6	Formasi Fungsional pada BAPPEDA Kota Banda Aceh	15
TABEL 2.7	Daftar Inventaris Aset BAPPEDA Kota Banda Aceh	16
TABEL 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh Sesuai Renstra BAPPEDA 2023 – 2026	18
TABEL 2.9	Capaian SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh 2020 - 2024	19
TABEL 2.10	Capaian SAKIP BAPPEDA Kota Banda Aceh 2020 - 2024	20
TABEL 2.11	Angka Indeks Inovasi Daerah Kota Banda Aceh 2020 - 2024	20
TABEL 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh	22
TABEL 2.13	Pemetaan Masalah pada BAPPEDA Kota Banda Aceh	27
TABEL 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh 2025 - 2029 Beserta Indikator dan Target Capaian	30
TABEL 3.2	Penahapan Renstra BAPPEDA	31
TABEL 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh	34

TABEL 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	49
TABEL 4.3	Daftar Sub Kegiatan prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan	70
TABEL 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Banda Aceh	71
TABEL 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAPPEDA Kota Banda Aceh	72

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk jangka menengah atau untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan hingga uraian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Renstra perangkat daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, yang artinya, seluruh informasi baik tentang sumber daya maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen tersebut hanya meruakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Dokumen Renstra perangkat daerah nantinya akan menjadi panduan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) disetiap tahunnya.

Tahapan penyusunan Renstra dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini menyatakan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan penyusunan, yaitu penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim, serta penyiapan data dan informasi.
- 2) Penyusunan Rancangan Awal.
- 3) Penyusunan Rancangan.
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- 5) Perumusan Rancangan Akhir.
- 6) Penetapan dokumen.

Selain merujuk pada peraturan-peraturan tersebut diatas, penyusunan Renstra periode 2025 – 2029 secara spesifik juga dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Renstra BAPPEDA periode 2025 – 2029 disusun sesuai arahan dari Surat Edaran Walikota Banda Aceh nomor 050/0991 tahun 2025 dan merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh tahun 2025 – 2029. Dokumen ini berisikan analisis gambaran pelayanan BAPPEDA; analisis permasalahan dan isu strategis; rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BAPPEDA selama periode 5 (lima) tahun ke depan; serta uraian rencana program, kegiatan, sub kegiatan termasuk penetapan pagu indikatif; dan penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) jangka menengah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra BAPPEDA 2025 – 2029 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 - 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 17) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 18) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
- 19) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2045;
- 20) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2029;
- 21) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistim Informasi Geografis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
- 22) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 36);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran RPJMD menjadi program dan kegiatan yang lebih terinci dan spesifik sesuai tugas, fungsi dan kewenangan BAPPEDA.

Tujuan dari Penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2025 – 2029 adalah:

- 1) Menjadi arah kebijakan dan acuan kerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran serta penentuan prioritas program jangka menengah BAPPEDA.
- 2) Menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan rencana kerja BAPPEDA selama 5 (lima) tahun ke depan.
- 3) Menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappeda dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan perangkat daerah termasuk di dalamnya tupoksi, sumber daya, termasuk evaluasi kinerja perangkat daerah. Bab ini juga menjelaskan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat uraian tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan perangkat daerah dalam periode 2025 -2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta seluruh kinerja, indikator, target dan pagu indikatif selama 5 tahun. Bab ini juga memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah periode 2025 – 2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

2.1. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BAPPEDA

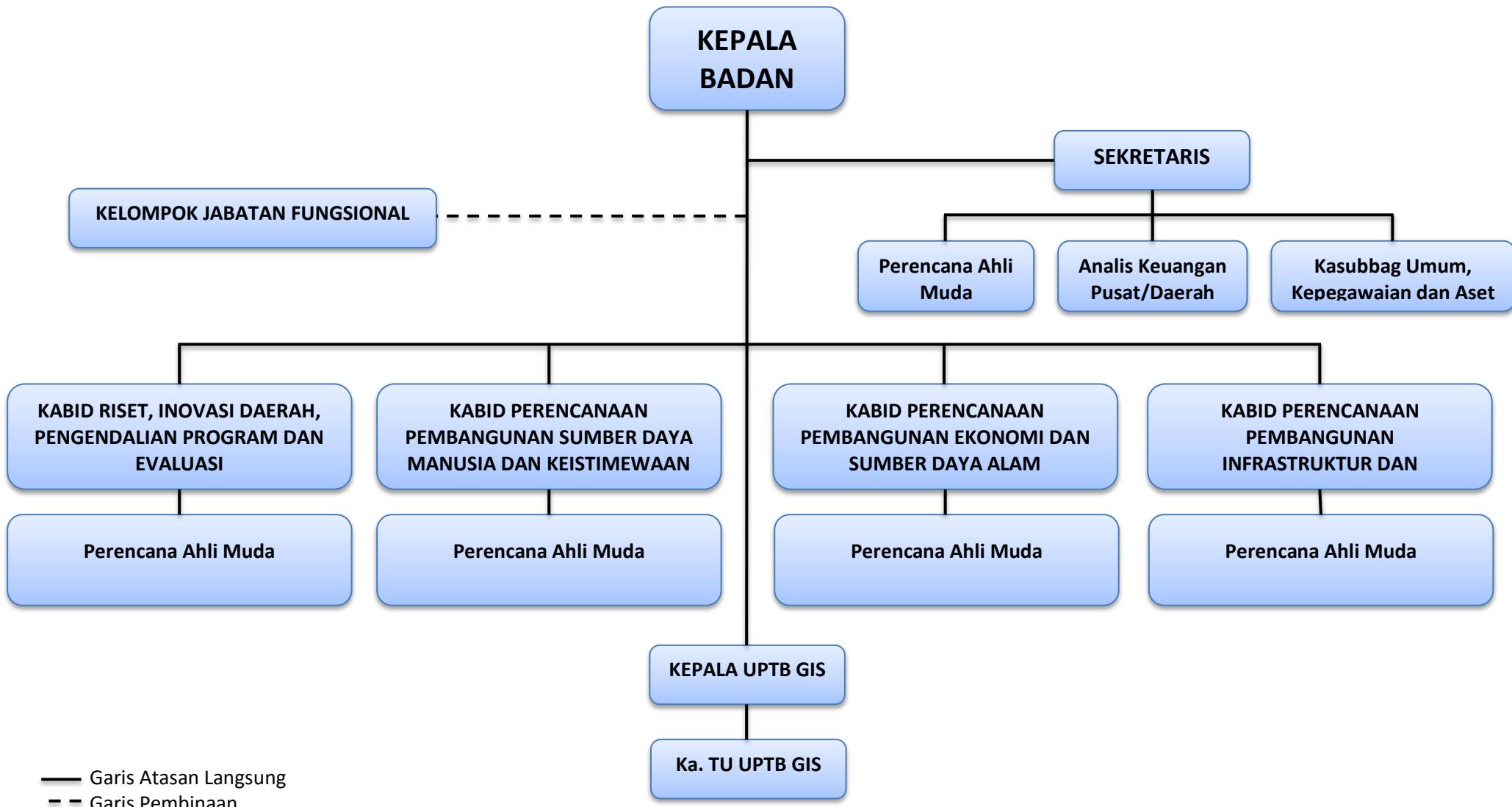
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022, tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), menyatakan bahwa BAPPEDA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Sebagai Badan yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penyusunan dokumen perencanaan daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, BAPPEDA mengkoordinir seluruh proses perencanaan di daerah baik dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (tahunan). Sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), BAPPEDA juga berperan di dalam mengawal penyusunan seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah agar selaras dan harmonis dengan perencanaan daerah.

Terkait Riset dan Inovasi daerah, sesuai amanat dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, diperlukan integrasi antara BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) dengan BAPPEDA. Sehingga tugas dan fungsi BAPPEDA yang semula fokus pada Bidang Urusan Perencanaan bertambah mengelola urusan pengembangan Riset dan Inovasi Daerah dan dapat diubah namanya menjadi BAPPERIDA. Hingga saat ini, meski proses penggabungan/integrasi nama organisasi BAPPERIDA tersebut masih dalam proses penetapan Perda, tugas dan fungsi BRIDA sendiri telah lebih dahulu melebur dalam Tupoksi BAPPEDA sesuai Perwal Banda Aceh Nomor 36 tahun 2022.

Adapun susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 - Terdiri dari Jabatan Fungsional Perencanaan Ahli Muda, Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah, serta Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- c. Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi;
 - Terdiri dari 3 Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan;
 - Terdiri dari 3 Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - Terdiri dari 3 Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - Terdiri dari 3 Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Banda Aceh
(Perwal No. 36 tahun 2022)



Untuk mendukung pelaksanaan tupoksinya, BAPPEDA juga memiliki UPTB SIG (Sistim Informasi Geografis) yang beroperasi sesuai Perwal no 10 tahun 2011 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistim Informasi Geografis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. UPTB SIG atau GIS (*Geographic Information System*) ini bertugas mendukung pelaksanaan kegiatan teknis BAPPEDA yang berhubungan dengan pelayanan informasi geografis. Selama 5 (lima) tahun terakhir, BAPPEDA telah memproduksi sebanyak 30 jenis album dengan total 175 Peta Tematik yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Peta tersebut dapat diakses langsung pada Website BAPPEDA Kota Banda Aceh <http://bappeda.bandaacehkota.go.id/katalog>. Berikut adalah daftar rincian produk album peta tematik yang telah dihasilkan oleh UPTB SIG sejak tahun 2020.

Tabel.2.1.
Daftar Produksi Album Peta Tematik UPTB SIG BAPPEDA Tahun 2020 – 2024

No	Daftar Pekerjaan	Tahun Produksi	Jumlah Peta (unit)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Survei dan Pemetaan Data Spasial UMKM	2020	11	Pekerjaan Bidang Ekonomi Bappeda
2	Peta Alokasi DOKA Banda Aceh 2020-2022	2020	1	Pekerjaan Bidang Litbang Bappeda
3	Suhu Permukaan Darat Tahun 2020	2020	1	Koleksi Geodatabase UPTB-GIS
4	Integrasi Data PBB-BPN	2020	2	Pekerjaan BPKK
5	Tingkat Kepadatan Kawasan Terbangun Tahun 2005	2020	1	Koleksi Geodatabase UPTB-GIS
6	Tingkat Kepadatan Kawasan Terbangun Tahun 2019	2020	1	Koleksi Geodatabase UPTB-GIS
7	Tingkat Kepadatan Kawasan Vegetasi Tahun 2005	2020	1	Koleksi Geodatabase UPTB-GIS
8	Tingkat Kepadatan Kawasan Vegetasi Tahun 2019	2020	1	Koleksi Geodatabase UPTB-GIS
9	Suhu Permukaan Darat Tahun 2005	2020	1	Koleksi Geodatabase UPTB-GIS
10	Suhu Permukaan Darat Tahun 2019	2020	1	Koleksi Geodatabase UPTB-GIS
11	Sebaran Covid-19	2020	15	Pekerjaan Sekretariat Pemko
12	Kawasan Masjid Teuku Umar 1979 dan 2016	2020		Pekerjaan Sekretariat Kota
13	Peta Kecamatan Lueng Bata Berdasarkan Perda. Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2000	2020	1	Pekerjaan Sekretariat Kota

No	Daftar Pekerjaan	Tahun Produksi	Jumlah Peta (unit)	Keterangan
1	2	3	4	5
14	Peta Administrasi Kota Banda Aceh Tahun 1981	2020	1	Koleksi Geodatabase UPTB-GIS
15	Peta Peluang Investasi Kota Banda Aceh (RUPM)	2020	1	Pekerjaan DPMPTSP
16	Survei dan Pemetaan Data Spasial UMKM	2021	11	Pekerjaan Bidang Ekonomi Bappeda
17	Kepadatan Bangunan Tahun 2016	2021	2	Untuk keperluan pemaparan rapat
18	Penggunaan Lahan Gp. Deah Raya	2021	1	Kerjasama dengan BPN Kota Banda Aceh
19	Sebaran Baliho	2021	1	Pekerjaan DPMPTSP
20	Survei dan Pemetaan Data Spasial Penggunaan Lahan Tahun 2022	2022	10	Pekerjaan UPTB-GIS Bappeda
21	Survei Lokasi Rumah Potong Ayam	2022	1	Pekerjaan DPPKP
22	Survei Kajian Penerapan Prinsip Kota Inklusif pada Fasilitas Pendidikan	2022	9	Pekerjaan Bidang SosBud Bappeda
23	Survei dan Pemetaan Data Spasial Penggunaan Lahan Tahun 2023	2023	7	Pekerjaan UPTB-GIS Bappeda
24	Pengolahan Data Spasial Mangrove Time Series	2023	4	Pekerjaan Bidang Ekonomi Bappeda
25	Pengolahan Data Spasial Penggunaan Lahan Tahun 2023	2024	33	Koleksi Geodatabase UPTB-GIS
26	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	2024	33	Pekerjaan Dinas Perkim
27	Pengolahan Data Spasial Tutupan Lahan RTH Hutan Kota BNI Jeulingke Time Series	2024	1	Pekerjaan Bidang Ekonomi Bappeda
28	Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security And Vulnerability Atlas (Fsva)	2024	6	Pekerjaan DPPKP
29	Instrumen SSK Kota Banda Aceh	2024	7	Pekerjaan Bidang Sarpras Bappeda
30	Survei Realisasi Pekerjaan Fisik T.A 2024	2024	10	Pekerjaan UPTB-GIS Bappeda
	TOTAL		175	

Sumber: UPTB SIG BAPPEDA, 2025

2.1.2. Sumber Daya BAPPEDA

Sumber Daya Manusia (ASN dan Non ASN)

Dalam menjalankan tugasnya BAPPEDA didukung oleh sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian baik ASN maupun Non ASN. Secara total BAPPEDA memiliki 66 pegawai, dengan rincian sebagai berikut: 47 orang ASN dan 19 Non ASN terdiri dari 1 Kepala Badan, 1

Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 1 Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, 1 Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda, 1 fungsional Perencana Ahli Madya, 11 Fungsional Perencana Ahli Muda, 8 Fungsional Perencana Ahli Pertama, 1 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, 1 Kepala UPTB, 1 Tata Usaha UPTB GIS, dan 17 Pelaksana. Berikut adalah kondisi pegawai BAPPEDA beserta kebutuhan pegawai sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) hingga Bulan Mei 2025:

Tabel.2.2.
Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Per Bidang Perencanaan Pembangunan BAPPEDA
Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Selisih	Ket
1	Kepala Badan	1	1	0	
2	Sekretaris	1	1	0	
3	JF Perencana Ahli Madya	0	3	3	
4	JF Perencana Ahli Muda	2	4	2	
5	JF Perencana Ahli Pertama	5	5	0	
6	JF Analis Keuangan Negara Ahli Muda	1	1	0	
	Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya	0	12	0	
7	Bendahara	0	1	1	
8	Penyusun Laporan Keuangan	0	2	1	
9	Pengelola Gaji	0	1	1	
10	Pengelola Keuangan	0	1	1	
11	Pengadministrasi keuangan	1	2	0	
12	Pelaksana	0	3	3	
13	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset	1	1	0	
14	Pengelola Barang Milik Negara	1	2	1	
15	Pelaksana	0	7	7	
16	Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	1	1	0	
17	JF Perencana Ahli Madya	0	3	3	
18	JF Perencana Ahli Muda	3	5	2	
19	JF Perencana Ahli Pertama	1	7	6	

No	Nama Jabatan	Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Selisih	Ket
20	Pelaksana	4	14	10	
21	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	1	1	0	
22	JF Perencana Ahli Madya	0	3	3	
23	JF Perencana Ahli Muda	1	5	4	
24	JF Perencana Ahli Pertama	0	7	7	
25	Pelaksana	4	15	11	
26	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1	1	0	
27	JF Perencana Ahli Madya	1	3	2	
28	JF Perencana Ahli Muda	2	5	3	
29	JF Perencana Ahli Pertama	1	6	5	
30	Pelaksana	4	22	18	
31	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1	1	0	
32	JF Perencana Ahli Madya	0	3	3	
33	JF Perencana Ahli Muda	3	5	2	
34	JF Perencana Ahli Pertama	1	7	6	
35	Pelaksana	4	19	15	
36	Kepala UPTD Sistem Informasi Geografis	0	1	1	
37	Kepala Tata Usaha UPTD Sistem Informasi Geografis	1	1	0	
38	Analis Sistem Informasi	0	1	1	
39	Pengelola Data Base	0	1	1	
40	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	0	1	1	
41	Pengelola Teknologi Informasi	0	1	1	
42	Pengolah Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan	0	1	1	
43	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	1	
TOTAL		47	188	141	

Sumber: Subbagian Kepegawaian dan Aset, BAPPEDA, 2025

Selain ASN BAPPEDA memiliki tenaga non ASN yang mendukung pelaksanaan tupoksi BAPPEDA baik sebagai pengelola bidang urusan perencanaan, urusan riset dan inovasi, maupun pada UPTD SIG. Hingga awal tahun 2025, BAPPEDA tercatat memiliki total 19 orang tenaga Non ASN yang tersebar diseluruh bidang dan UPTB SIG BAPPEDA. Rincian sebaran tenaga Non ASN pada BAPPEDA Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel.2.3.
Sebaran Tenaga Non ASN Pada BAPPEDA Kota Banda Aceh

No	Bidang Tugas	Jumlah		Total	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Bidang Sekretariat	6	1	7	Termasuk supir, penjaga malam dan CS
2	Bidang PP Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	1	0	1	
3	Bidang PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1	2	3	
4	Bidang PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1	0	1	
5	Bidang Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	1	3	4	
6	UPTB SIG	3	0	3	Tenaga Ahli
TOTAL		13	6	19	

Sumber: Subbagian Kepegawaian dan Aset, BAPPEDA, 2025

Dari segi kepangkatan dan golongan, BAPPEDA tercatat memiliki ASN yang cukup senior mengingat dari total 47 ASN, 40 orang diantaranya berada pada golongan III/c ke atas yang artinya telah memiliki masa kerja yang cukup signifikan. Hal ini perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam hal regenerasi pegawai dan pendistribusian tugas yang lebih seimbang. Namun secara kesetaraan gender, persentase pegawai BAPPEDA berdasarkan jenis kelamin cukup seimbang terlihat dari perbandingan pegawai laki-laki sebanyak 54,54% dan pegawai perempuan sebanyak 45,45%. Berikut adalah Daftar pegawai BAPPEDA, baik ASN maupun Non ASN berdasarkan golongan dan jenis kelamin.

Tabel.2.4.
Daftar Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	1	-	1
3	IV/a	5	10	15
4	III/d	9	10	19
5	III/c	1	2	3
6	III/b	5	2	7
7	III/a	-	-	-
8	II/d	1	-	1
9	Tenaga Ahli	3	-	3
10	Tenaga Kontrak	10	6	16
JUMLAH		36	30	66

Sumber: Subbagian Kepegawaian dan Aset, BAPPEDA, 2025

Terkait pendidikan, pegawai BAPPEDA memiliki sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang sangat baik, dimana dari total 66 pegawai, hanya 6 orang (9.09%) berpendidikan setingkat SLTP dan SLTA. Daftar pegawai BAPPEDA berdasarkan tingkat pendidikan terlihat dalam tabel berikut:

Tabel.2.5.
Daftar Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	S3	-	1	1
2	S2	6	14	20
3	S1	22	14	36
4	D.III	3	0	3
5	SLTA	4	1	5
6	SMP	1	0	1
JUMLAH		36	30	66

Sumber: Subbagian Kepegawaian dan Aset, BAPPEDA, 2025

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik, BAPPEDA membutuhkan tenaga Fungsional Perencana Ahli pada setiap tingkatan. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 264 Tahun 2024 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, menunjukkan adanya kebutuhan Perencana Ahli Madya sebanyak 41 orang, Perencana Ahli Muda sebanyak 58 orang, dan Perencana

Ahli Pertama 95 orang. Dengan rata-rata kebutuhan di masing-masing perangkat daerah sebanyak 3 orang. Hal ini sangat penting untuk mendukung tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan pada level perangkat daerah.

BAPPEDA sendiri memiliki formasi Fungsional Perencana Ahli Madya sebanyak 15 orang, Perencana Ahli Muda sebanyak 24 orang, dan Perencana Ahli Pertama 32 orang. Hingga awal tahun 2025, tenaga fungsional perencana yang tersedia pada BAPPEDA adalah 1 orang Perencana Ahli Madya, 11 orang Perencana Ahli Muda, serta 8 orang Perencana Ahli Pertama. Selain Fungsional Perencana, BAPPEDA juga memiliki tenaga Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda sebanyak 1 orang yang bertugas mengelola internal keuangan BAPPEDA. Rincian formasi tenaga fungsional pada BAPPEDA Kota Banda Aceh terlihat pada Tabel berikut:

Tabel.2.6.
Formasi Fungsional pada BAPPEDA Kota Banda Aceh

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Terpenuhi	Jumlah Kekurangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencana Ahli Madya	12	15	1	14	
2	Perencana Ahli Muda	10	24	11	13	
3	Perencana Ahli Pertama	8	32	8	24	
4	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	9	1	1	0	

Sumber: Subbagian Kepegawaian dan Aset, BAPPEDA, 2025

Selain tenaga Fungsional Perencana, BAPPEDA yang juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengembangan riset dan inovasi daerah, tentunya membutuhkan dukungan tenaga Fungsional peneliti. Namun demikian hingga saat ini, Fungsional Peneliti pada BAPPEDA Kota Banda Aceh masih belum tersedia.

Sumber Daya Fisik dan Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, BAPPEDA memiliki 1 unit bangunan gedung kantor dengan luas 520,75 m² dan luas tanah 1.452 m². Kondisi ini belum ideal mengingat tupoksi BAPPEDA sebagai instansi yang menfasilitasi berbagai pertemuan terkait perencanaan, membutuhkan ruang

rapat disetiap bidang perencanaan serta aula yang cukup luas untuk menampung seluruh stakeholders perencanaan. Terlebih lagi dengan adanya rencana pembentukan BAPPERIDA, dibutuhkan ruang bangunan untuk penambahan Bidang Riset dan Penelitian. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan penambahan luas lahan dan bangunan kantor BAPPEDA di masa yang akan datang.

Selain bangunan gedung, BAPPEDA memiliki aset peralatan dan mesin yang cukup memadai saat ini, diantaranya kendaraan dinas/ operasional kantor, genset, alat kerja berupa komputer, printer, proyektor dan peralatan kantor lainnya. Namun demikian, akibat kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, pengadaan peralatan kantor mengalami penundaan di beberapa tahun terakhir, termasuk diantaranya pembatasan anggaran untuk pemeliharaan. Jika hal ini berlanjut, dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas BAPPEDA.

Berikut adalah sumber daya fisik dan sarana prasarana yang dimiliki BAPPEDA di dalam mendukung kegiatan operasionalnya:

Tabel.2.7.
Daftar Inventaris Aset BAPPEDA Banda Aceh

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah	1	6.336.087.000	
2	Gedung dan Bangunan	4	3.546.148.000	
3	Peralatan dan Mesin	632	3.287.081.197	
4	Instalasi Solar Panel	2	123.601.000	
TOTAL			13.292.917.197	

Sumber: Laporan Inventaris Aset BAPPEDA, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Evaluasi kinerja pelayanan BAPPEDA dilakukan berdasarkan Renstra BAPPEDA sebelumnya yaitu periode 2023 – 2026. Renstra BAPPEDA tersebut disusun dengan merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026. Hal ini dilakukan sesuai dengan Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022.

Akibat berbedanya periode perencanaan tersebut, serta berubahnya nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sejak terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkultur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebabkan terjadinya perubahan indikator kinerja dengan Renstra periode 2017 – 2022. Tidak konsistennya indikator kinerja dalam 2 (dua) periode Renstra tersebut menyebabkan sulitnya dilakukan pengukuran kinerja strategis selama 5 (lima) tahun terakhir. BAPPEDA Banda Aceh dalam hal ini memutuskan memaparkan capaian kinerja sesuai Renstra BAPPEDA periode 2023 – 2026.

Sesuai Renstra periode tersebut, BAPPEDA memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD; Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD; dan Persentase implementasi rencana kelitbangan. Indikator tersebut disusun sesuai arahan dalam lampiran Permendagri No 86 tahun 2017. Selain itu ketersediaan dokumen perencanaan daerah baik perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang telah ditetapkan dalam Perda/Perkada juga diangkat sebagai indikator keberhasilan BAPPEDA selaku pengelola perencanaan daerah.

Capaian kinerja BAPPEDA beserta rencana, target dan realisasi anggaran sesuai Renstra BAPPEDA tahun 2023 – 2026 dapat dilihat dalam tabel 2.8. di bawah ini:

Tabel.2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh Sesuai Renstra BAPPEDA 2023 - 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8/4	13 = 9/5	14	15	16
1	Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	Renstra Bappeda periode 2023 - 2026
2	Percentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	Renstra Bappeda periode 2023 - 2026
3	Percentase implementasi rencana kelitbangam	Persen	100%	100%	100%	100%	0%	27,78%	-	-	0%	27,78%	-	-	Renstra Bappeda periode 2023 - 2026
4	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	100%	100%	100%	-	RPJPD Banda Aceh periode 2007 - 2027, Qanun No 16 Tahun 2007 RPJPD Banda Aceh periode 2025 – 2045, Qanun No 1 Tahun 2025
5	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	100%	100%	-	-	RPD Banda Aceh periode 2023 - 2026, Perwal No 9 Tahun 2022
6	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	100%	100%	-	-	RKPD Banda Aceh Tahun 2024, Perwal No. 11 Tahun 2023 RKPD Banda Aceh Tahun 2025, Perwal No. 20 Tahun 2024

Keberhasilan pelaksanaan tupoksi BAPPEDA juga terlihat dari peningkatan nilai SAKIP (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemko Banda Aceh, khususnya pada komponen perencanaan kinerja. Dalam 5 (lima) tahun terakhir bobot nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,63% dari semula 19,91 di tahun 2020 menjadi 21,23 di tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan perbaikan disetiap tahunnya meski masih cukup jauh dari bobot sempurna yaitu 30 poin untuk komponen perencanaan kinerja. Pertumbuhan nilai SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh sejak tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.9. dibawah ini.

Tabel.2.9.
Capaian SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh 2020 - 2024

No	Komponen yang Dinilai	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	19,91	20,01	20,93	21,02	21,23	
2	Pengukuran Kinerja	13,72	13,82	15,34	15,39	15,61	
3	Pelaporan Kinerja	9,53	9,69	11,06	11,17	11,32	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6,00	6,00	14,10	14,24	14,59	
5	Capaian Kinerja	11,02	11,26	-	-	-	Mulai 2022, sesuai PermenpanRB No 88 Tahun 2021, Capaian kinerja tidak lagi dihitung
	Total Nilai	60,18	60,78	61,43	61,82	62,75	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	

Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kota Banda Aceh

Untuk nilai akuntabilitas kinerja organisasi BAPPEDA di 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok, khususnya di tahun 2023 terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan dari angka 80,55 dengan nilai A di tahun 2022, menjadi 69,2 dengan kategori B di tahun 2023. Hal ini menurut pihak Inspektorat terjadi karena adanya perubahan metode penghitungan skor nilai disetiap komponen. Namun demikian, setelah dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai masukan Inspektorat, angka tersebut kembali meningkat di tahun 2024 sehingga kinerja BAPPEDA kembali memperoleh kategori BB dengan poin nilai mencapai 80. Rincian nilai SAKIP BAPPEDA selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 2.10. sebagai berikut:

Tabel.2.10.
Capaian SAKIP BAPPEDA Kota Banda Aceh 2020 – 2024

No	Komponen yang Dinilai	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
1	Perencanaan Kinerja	-	27,60	26,10	21	24	
2	Pengukuran Kinerja	-	25,80	23,70	19,5	24	
3	Pelaporan Kinerja	-	12,15	12,75	11,7	12	
4	Evaluasi Internal	-	21,25	18,00	17	20	
	Total Nilai	-	86,80	80,55	69,2	80	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A	B	BB	

Sumber: Inspektorat Kota Banda Aceh

Capaian pada bidang riset dan inovasi daerah di Kota Banda Aceh, yang menjadi salah satu bagian dari tupoksi BAPPEDA, dapat dilihat dari skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Banda Aceh. Data IID menunjukkan angka yang tidak stabil selama 5 (lima) tahun terakhir. Peringkat Banda Aceh turun secara drastis dari peringkat 32 di tahun 2020 menjadi peringkat 85 di tahun 2024. Adanya perubahan standar penghitungan IID sejak tahun 2021 juga menjadi salah satu faktor penyebab turunnya skor dan kategori Banda Aceh dari sangat inovatif ditahun 2020 menjadi kurang inovatif di tahun 2021. Naik turunnya skor IID sejak 2021 dengan peringkat yang semakin menurun patut menjadi perhatian BAPPEDA di masa mendatang. Berikut adalah nilai IID Kota Banda Aceh sejak tahun 2020.

Tabel. 2.11.
Angka Indeks Inovasi Daerah Kota Banda Aceh 2020 – 2024

Tahun	Skor Indeks	Kategori	Peringkat	Ket
2020	1.572	Sangat Inovatif	32	
2021	22,52	Kurang Inovatif	77	Mulai 2021 diterapkan standar penghitungan skor yang berbeda yang ditetapkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)
2022	48,42	Inovatif	58	
2023	44,58	Inovatif	65	
2024	35,42	Inovatif	85	

Sumber: RPJMD Kota Banda Aceh 2025 - 2029

Terkait penganggaran, total rencana pagu anggaran BAPPEDA sejak tahun 2023 relatif stabil dikisaran 15 Miliar lebih dengan tingkat realisasi cukup rendah yaitu di angka 54% di tahun 2023 dan 59% di tahun 2024. Hal ini menyebabkan

terjadinya penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan BAPPEDA, khususnya pada Program Penelitian dan Pengembangan. Program tersebut tercatat memiliki tingkat realisasi terendah dari total 4 Program yang direncanakan BAPPEDA dalam Renstra 2023 – 2026, yaitu 1,63% di tahun 2023 dan 4,43% di tahun 2024. Dampak dari kondisi keuangan daerah yang tidak stabil sangat mempengaruhi tingkat realisasi keuangan/ penganggaran pada seluruh program dan kegiatan BAPPEDA khususnya di tahun 2023 dan 2024. Rincian perencanaan kebutuhan anggaran BAPPEDA beserta realisasinya dapat dilihat dalam tabel 2.12 berikut ini:

Tabel.2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kota Banda Aceh

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Pertumbuhan (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 5/3	8 = 6/4	9 = (4-3)/3	10 = (6-5)/6
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.809.854.319	15.470.620.472	8.553.754.262	9.204.451.206	54,10	59,50	(2,15)	7,61
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	10.707.571.287	10.713.571.287	7.409.282.205	8.140.140.444	69,20	75,98	0,06	9,86
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.982.850	76.982.850	48.941.000	15.212.000	63,57	19,76	-	(68,92)
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.612.582.693	8.612.582.693	6.306.815.346	7.283.956.575	73,23	84,57	-	15,49
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163.750.000	163.750.000	12.000.000	-	7,33	-	-	(100,00)
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.603.600	986.603.600	364.872.965	373.016.673	36,47	37,81	(1,40)	2,23
1.5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80.000.000	100.000.000	-	-	-	-	25,00	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	461.158.532	461.158.532	350.434.494	333.958.129	75,99	72,42	-	(4,70)
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.493.612	312.493.612	326.218.400	133.997.067	104,39	42,88	-	(58,92)

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Pertumbuhan (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 5/3	8 = 6/4	9 = (4-3)/3	10 = (6-5)/6
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.459.406.087	2.529.664.660	977.159.407	947.955.762	39,73	37,47	2,86	(2,99)
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.411.207.024	1.411.207.024	872.680.440	842.532.762	61,84	59,70	-	(3,45)
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	58.941.000	129.199.573	37.010.000	34.432.000	62,79	26,65	119,20	(6,97)
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	655.448.063	655.448.063	57.773.967	70.611.000	8,81	10,77	-	22,22
2.4	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	333.810.000	333.810.000	9.695.000	380.000	2,90	0,11	-	(96,08)
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	845.999.420	845.999.420	138.090.000	56.355.000	16,32	6,66	-	(59,19)
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	267.679.500	267.679.500	44.785.000	22.080.000	16,73	8,25	-	(50,70)

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Pertumbuhan (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 5/3	8 = 6/4	9 = (4-3)/3	10 = (6-5)/6
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	328.291.010	328.291.010	45.835.000	14.850.000	13,96	4,52	-	(67,60)
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana	250.028.910	250.028.910	47.470.000	19.425.000	18,99	7,77	-	(59,08)
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.796.877.525	1.381.385.105	29.222.650	60.000.000	1,63	4,34	(23,12)	105,32
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	387.889.930	387.889.930	29.222.650	-	7,53	-	-	(100,00)
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.130.462.840	714.970.420	-	60.000.000	-	8,39	(36,75)	-
4.3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	278.524.755	278.524.755	-	-	-	-	-	-

Sumber: Renstra BAPPEDA Tahun 2023-2036; Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BAPPEDA TA 2023 dan 2024, data diolah

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan BAPPEDA

Kelompok sasaran layanan BAPPEDA adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh. Selaku badan yang mengelola proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA memiliki peran di dalam membina dan menfasilitasi 44 perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam menyusun dokumen perencanaan OPD. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara perencanaan daerah dengan perencanaan perangkat daerah. Demikian pula halnya dengan upaya optimalisasi pengembangan riset dan inovasi daerah pada setiap OPD menjadi salah satu sasaran organisasi BAPPEDA, agar kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam disusun berdasarkan bukti.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

2.2.1. Permasalahan Pelayanan BAPPEDA

Permasalahan perangkat daerah disusun dengan memperhatikan tupoksi PD serta uraian visi dan misi kepala daerah terpilih. BAPPEDA sesuai Perwal no 36 tahun 2022 bertanggungjawab terhadap 2 (dua) bidang urusan yaitu Bidang Urusan Perencanaan, dan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan yang didalamnya termasuk riset dan inovasi daerah. Permasalahan dirumuskan bersama dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga diperoleh pemetaan masalah yang berjenjang mulai dari masalah pokok hingga akar permasalahan yang menjadi faktor penyebabnya.

Terkait bidang urusan perencanaan, permasalahan pokok BAPPEDA adalah kualitas perencanaan pembangunan daerah. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan daerah, sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang berkualitas baik dalam aspek keselarasan, integrasi, dengan sumber daya yang tersedia sehingga tercipta perencanaan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Perencanaan yang baik memiliki target kinerja yang jelas, spesifik dan terukur serta melibatkan berbagai pihak yang terkait. Perumusan masalah mempertimbangkan kondisi terkini dari indikator perencanaan daerah. Masih rendahnya nilai indikator kinerja perencanaan menjadi indikasi

bahwa kualitas perencanaan masih buruk atau memerlukan perbaikan. Hal ini terlihat dari nilai SAKIP Kota Banda Aceh khususnya dari komponen perencanaan kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yang masih berada dibawah bobot optimal.

Bidang urusan lainnya yang menjadi tanggungjawab BAPPEDA adalah Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan termasuk di dalamnya Riset dan Inovasi Daerah. Hasil evaluasi Renstra BAPPEDA 2023 – 2026 menunjukkan bahwa masih rendahnya capaian kinerja BAPPEDA dibidang penelitian dan pengembangan. Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Banda Aceh, yang merupakan alat ukur bagi tingkat inovasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, selama 5 (lima) tahun terakhir juga menunjukkan angka yang semakin menurun. Hal ini menjadi salah satu dasar penetapan masalah pokok BAPPEDA dalam dokumen Renstra TA 2025 – 2029.

Visi dan Misi Kota Banda Aceh 2025 - 2029

Visi Kota Banda Aceh 2025 – 2029 adalah **“Banda Aceh Kota Kolaborasi”**. Visi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak baik antar instansi pemerintahan, maupun dengan sektor swasta, akademisi, masyarakat serta organisasi lainnya. Melalui visi tersebut Banda Aceh diharapkan menjadi kota yang berdaya saing, ramah terhadap inovasi, dan tumbuh secara berkelanjutan dalam bingkai islami.

Misi Kota Banda Aceh 2025 – 2029 terdiri dari 7 (tujuh) misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang adaptif, inovatif dan responsif;
3. Memperkuat kemitraan pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah;
4. Memanfaatkan potensi sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota;
5. Meningkatkan nilai-nilai agama dan budaya;
6. Memberdayakan generasi muda dan memajukan olahraga;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Salah satu permasalahan yang teridentifikasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi, seperti tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Banda

Aceh 2025 – 2029, adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal. Poin ini secara tidak langsung terkait dengan tupoksi BAPPEDA, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan perencanaan pembangunan daerah.

Poin-poin tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan BAPPEDA di dalam menetapkan pemetaan masalah internal organisasi sebagai dasar penyusunan target-target kinerja dalam Renstra 2025 – 2029. Masalah pokok tersebut sesuai arahan Permendagri No 86 Tahun 2017 menjadi panduan bagi perumusan sasaran perangkat daerah, sedangkan masalah dan akar masalah menjadi panduan bagi perumusan strategi dan arah kebijakan. Uraian masalah pokok BAPPEDA beserta seluruh faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat dilihat pada tabel 2.13, sebagai berikut.

Tabel. 2.13.
Pemetaan Masalah pada BAPPEDA Kota Banda Aceh

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Sinergitas/keselarasan perencanaan daerah belum optimal	SOP penyusunan dokumen perencanaan masih belum tersedia
		Masih banyak ketidaksesuaian penentuan indikator dalam dokumen perangkat daerah	Masih belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM perencana
			Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil (outcome) pembangunan
		Masih banyak perangkat daerah yang terlambat menyampaikan dokumen perencanaan	Belum optimalnya ketersediaan data perencanaan yang valid dan konsisten
			Koordinasi perencanaan kepada PD belum optimal
2	Rendahnya inovasi daerah	Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi kegiatan riset dan inovasi	Belum adanya masterplan/ peta jalan pengembangan inovasi daerah
			Belum adanya sistem identifikasi riset dan inovasi dari perangkat daerah
			BAPPERIDA belum terbentuk

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
3	Rendahnya kebijakan daerah yang didasari dari hasil riset dan penelitian	Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil riset dan penelitian	Masih rendahnya jumlah riset dan penelitian perangkat daerah
			Belum tersedianya SDM peneliti

2.2.2. Isu Strategis

Penetapan isu strategis BAPPEDA ditentukan dengan mempertimbangkan gambaran pelayanan BAPPEDA, Visi dan Misi Kepala Daerah, serta uraian permasalahan. Berdasarkan hal tersebut teridentifikasi bahwa isu-isu terkait kualitas perencanaan serta peran serta riset dan inovasi daerah menjadi isu utama BAPPEDA Kota Banda Aceh khususnya untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Oleh sebab itu ditetapkan isu strategis Renstra BAPPEDA periode 2025 – 2029 adalah ***“Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Peran Inovasi Daerah yang Mendukung Pembangunan Daerah”***.

Selain isu utama terkait kualitas perencanaan serta peran riset dan inovasi dalam pembangunan Kota Banda Aceh, BAPPEDA juga memperhatikan berbagai isu lainnya terkait pembangunan daerah seperti ***Daya Saing Daerah, Stunting, Kemiskinan, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)***. Meskipun tidak menjadi isu utama, isu-isu tersebut memerlukan pengawalan dan pemantauan khusus dari BAPPEDA, agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dapat terkoordinasikan dan tercapai dengan baik.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran BAPPEDA, sesuai pohon kinerja dan cascading RPJMD Kota Banda Aceh 2025 – 2029, mengacu pada tujuan kedua RPJMD yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel”**, yang selanjutnya diturunkan pada sasaran RPJMD, **“Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif”**. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Renstra BAPPEDA juga menggambarkan upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang tergambar pada pemetaan masalah pada BAPPEDA Kota Banda Aceh.

3.1. TUJUAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2025 – 2029

Tujuan Renstra BAPPEDA periode 2025-2029 ditentukan dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta sasaran dari RPJMD Kota Banda Aceh. Meskipun BAPPEDA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 2 (dua) bidang urusan, namun sesuai arahan Inmendagri No 2 Tahun 2025, kedua urusan tersebut dapat dituangkan ke dalam 1 (satu) tujuan organisasi. Adapun tujuan Renstra BAPPEDA 2025 – 2029 adalah **“MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PERAN RISET DAN INOVASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN DAERAH”**.

3.2. SASARAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2025 – 2029

Untuk mencapai tujuan dan mengakomodir 2 (dua) bidang urusan yang menjadi tanggungjawab BAPPEDA, maka Renstra BAPPEDA periode 2025 – 2029, diuraikan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. *Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif;***
- 2. *Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah.***

Berikut adalah tabel rumusan tujuan dan sasaran BAPPEDA lengkap dengan indikator dan target sasarnya selama 5 (lima) tahun.

Tabel. 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDA 2025 - 2029 beserta Indikator dan Target Capaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN							KET
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Predikat SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	Penilaian SAKIP Daerah yang diterbitkan oleh KemenPAN-RB)
			Indeks Inovasi Daerah	35,42	40	43	46	48	50	60		Skor IID yang diterbitkan Kemendagri disetiap tahunnya
		Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	21,23	21,43	21,63	21,83	22,03	22,23	22,43		Tahun 2023: 21,03 Tahun 2024: 21,23
		Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kebijakan berbasis penelitian dan riset yang diterapkan dibagi jumlah penelitian dan riset yang direkomendasikan dikali 100%

3.3. STRATEGI BAPPEDA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BAPPEDA 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sinergitas/keselarasan perencanaan daerah.
- b. Peningkatan pengawasan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- c. Optimalisasi koordinasi dan fasilitasi kegiatan riset dan inovasi.
- d. Optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian.

Sejalan dengan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BAPPEDA selama periode 2025 – 2029, ditetapkan prioritas pelaksanaan program dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Penahapan Renstra BAPPEDA

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan organisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan antar perangkat daerah.	Peningkatan kualitas perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah.	Peningkatan kualitas perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah.	Pemantapan kualitas perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah.	Pemantapan kualitas perencanaan dan peran serta riset dan inovasi untuk penerapan kebijakan pembangunan daerah.

3.4. ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA

Untuk mewujudkan target-target dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BAPPEDA 2025 – 2029, berikut ditetapkan arah kebijakan Renstra BAPPEDA selama periode 5 (lima) tahun kedepan, adalah:

- a) Penetapan SOP penyusunan dan penyetaraan dokumen perencanaan.
- b) Penambahan kuantitas dan kualitas tenaga fungsional pendukung kegiatan perencanaan dan penelitian.
- c) Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan.
- d) Optimalisasi validasi dan konsistensi data-data pembangunan.

- e) Penyusunan/penyempurnaan masterplan/peta jalan pengembangan inovasi daerah.
- f) Percepatan pembentukan BAPPERIDA.
- g) Pengembangan sistem identifikasi riset dan inovasi perangkat daerah.
- h) Peningkatan pelaksanaan dan kualitas kegiatan penelitian.

BAB IV.

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra BAPPEDA 2025 - 2029 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis tersebut BAPPEDA Kota Banda Aceh memiliki 5 Program yang terdiri dari 1 Program Penunjang, 2 Program Perencanaan dan 2 Program terkait penelitian dan pengembangan. Untuk mencapai seluruh target kinerja seluruh program tersebut, BAPPEDA merencanakan pelaksanaan total kegiatan sebanyak 18 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Adapun sasaran Renstra BAPPEDA yang pertama adalah **“Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif”**, didukung oleh 3 (tiga) program dengan 5 (lima) sasaran kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA;
4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah.

Sedangkan sasaran kedua, yaitu yang terkait Bidang urusan penelitian dan pengembangan, adalah **“Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah”**. Sasaran tersebut di dukung oleh 2 (dua) program dengan sasaran 2 (dua) kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangana dalam pembangunan; dan
2. Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah.

Seluruh rumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra BAPPEDA dapat dilihat dalam tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel. 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra BAPPEDA 2025 - 2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah				1. Predikat SAKIP 2. Indeks Inovasi Daerah		
		Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif			SAKIP Komponen Perencanaan		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD. 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik. 3. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. 4. Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota. 5. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 	Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	
						Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya data dan informasi pemerintahan daerah yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
						Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.		1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. 2. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. 3. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia. 	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA.		2. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang bidang perekonomian. 2. Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian. 3. Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA. 	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonominan	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahannya.		3. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan wilayah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang infratruktur dan kewilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Bidang Infrastruktur. 2. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur. 3. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah. 4. Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayah. 	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Program Rutin/ Penunjang
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. 3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan. 4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan. 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. 2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangda dalam pembangunan		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial. 2. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
				Tersedianya rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1. Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan. 2. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	
						Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. 2. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi	Program Riset dan Inovasi	
				Tersedianya invensi dan inovasi daerah	1. Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi.	Invensi dan Inovasi	
						Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Berdasarkan rumusan program/kegiatan/sub kegiatan diatas, disusunlah rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Kota Banda Aceh untuk periode 5 (lima) tahun kedepan beserta target kinerja serta rencana pagu indikatif. Penetapan rencana tersebut dimulai di tahun 2026 hingga 2030. Meskipun menjadi bagian dari Renstra 2025 – 2029, rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahun berjalan (tahun) 2025 tidak lagi dituangkan ke dalam renstra. Sebaliknya, sesuai arahan Inmendagri Nomor 2 tahun 2025, rencana tahun 2030 disertakan dalam tabel rencana program/kegiatan/sub kegiatan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan atau pijakan bagi perangkat daerah untuk penyusunan Renja di akhir masa Renstra 2025 – 2029.

Tabel 4.2. menunjukkan total kebutuhan pagu indikatif BAPPEDA selama 5 (lima) tahun mendatang diperkirakan sekitar 70,5 Miliar Rupiah dengan rata-rata besaran anggaran pertahun berkisar antara 14 Miliar Rupiah. Dari total anggaran tersebut, sekitar 75% anggaran digunakan pada program pendukung dengan belanja terbesar pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Artinya hanya 25% dari total anggaran BAPPEDA digunakan secara langsung untuk mencapai target-target kinerjanya selama 5 (lima) tahun. Kondisi keuangan daerah yang belum stabil masih menjadi tantangan dan perhatian khususnya bagi BAPPEDA di dalam menjalankan tupoksinya secara optimal serta dalam upaya mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh 2025 - 2029.

Seluruh rincian rencana program/kegiatan/sub kegiatan BAPPEDA selama 5 (lima) tahun, beserta rencana target dan kebutuhan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel.4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					14.290.648.129	-	14.151.992.980	-	13.985.873.280	-	14.020.092.383	-	14.054.653.677			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63,20 %	BB	10.536.162.994	BB	10.563.962.994	A	10.563.962.994	A	10.563.962.994	A	10.563.962.994	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 dokum en	42.878.200	12 dokum en	42.878.200	12 dokum en	42.878.200	12 dokum en	42.878.200	12 dokum en	42.878.200		
1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 doku men	12 dokum en	42.878.200	12 dokum en	42.878.200	12 dokum en	42.878.200	12 dokum en	42.878.200	12 dokum en	42.878.200		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		66 orang	9.108.632.294	66 orang	9.108.632.294	66 orang	9.108.632.294	66 orang	9.108.632.294	66 orang	9.108.632.294		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	66 orang	9.108.632.294	66 orang	9.108.632.294	66 orang	9.108.632.294	66 orang	9.108.632.294	66 orang	9.108.632.294	Jumlah pegawai dan pagu dapat berubah sesuai kebutuhan	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 paket	57.800.000									
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappanya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	-	1 paket	57.800.000								
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	187.337.000	4 Paket	187.337.000	4 Paket	187.337.000	4 Paket	187.337.000	4 Paket	187.337.000			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		<p>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket			
				10 laporan		10 laporan		10 laporan		10 laporan		10 laporan			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	3.454.700									
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	4 Paket	44.321.200									
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	26.467.300									
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4 Paket	13.093.800									

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	10 laporan	100.000.000	10 laporan	100.000.000	10 laporan	100.000.000	10 laporan	100.000.000	10 laporan	100.000.000		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 unit	60.000.000	3 unit	30.000.000								
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	6 unit	60.000.000	3 unit	30.000.000								
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	727.760.000	12 laporan	727.760.000	12 laporan	727.760.000	12 laporan	727.760.000	12 laporan	727.760.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	12 laporan	401.000.000	12 laporan	401.000.000	12 laporan	401.000.000	12 laporan	401.000.000	12 laporan	401.000.000		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	12 laporan	326.760.000	12 laporan	326.760.000	12 laporan	326.760.000	12 laporan	326.760.000	12 laporan	326.760.000		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 unit	409.555.500	11 unit	409.555.500	11 unit	409.555.500	11 unit	409.555.500	11 unit	409.555.500		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		79 unit		79 unit		79 unit		79 unit		79 unit			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11 unit	351.028.000	11 unit	351.028.000	11 unit	351.028.000	11 unit	351.028.000	11 unit	351.028.000			
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	79 unit	58.527.500	79 unit	58.527.500	79 unit	58.527.500	79 unit	58.527.500	79 unit	58.527.500			
BIDANG URUSAN PERENCANAAN						3.280.992.900		3.309.943.757		3.255.242.275		3.456.129.389		3.352.192.729			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	100%	2.366.660.500	100%	2.146.599.310	100%	2.055.533.180	100%	2.150.487.901	100%	2.074.748.087			
		2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%	100%		100%		100%	100%	100%	100%					

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1 Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	Terlaksananya seluruh proses penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		1 dokumen	1.530.978.100	1 dokumen	1.410.537.400	1 dokumen	1.410.637.400	1 dokumen	1.410.737.400	1 dokumen	1.410.837.400		
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 berita acara		1 berita acara		1 berita acara		1 berita acara		1 berita acara			
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		20 berita acara		20 berita acara		20 berita acara		20 berita acara		20 berita acara			
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 berita acara		1 berita acara		1 berita acara		1 berita acara		1 berita acara			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	1 doku men	1 dokumen	110.259.600	1 dokumen	110.360.000	1 dokumen	110.460.000	1 dokumen	110.560.000	1 dokumen	110.660.000		
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	1 berita acara	75.420.200	1 berita acara	68.150.300								
3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20 berita acara	20 berita acara	80.707.300	20 berita acara	79.582.100								
4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	1 berita acara	195.752.600	1 berita acara	157.643.400								
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 doku men	2 dokumen	1.068.838.400	2 dokumen	994.801.600								

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi pemerintahan daerah yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		2 dokum en	370.214.800	2 dokum en	176.677.410	2 dokum en	185.511.280	2 dokum en	180.366.001	2 dokum en	204.526.187		
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		2 doku men	3 dokum en	370.214.800	2 dokum en	176.677.410	2 dokum en	185.511.280	2 dokum en	180.366.001	2 dokum en	204.526.187	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		2 laporan	410.308.200	2 laporan	501.902.200	2 laporan	401.902.200	2 laporan	501.902.200	2 laporan	401.902.200		
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 laporan	2 laporan	410.308.200	2 laporan	501.902.200	2 laporan	401.902.200	2 laporan	501.902.200	2 laporan	401.902.200	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		3 dokumen	55.159.400	3 dokumen	57.482.300								
1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dokumen	3 dokumen	55.159.400	3 dokumen	57.482.300								
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					914.332.400		1.163.344.447		1.199.709.095		1.305.641.488		1.277.444.642			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	Percentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	100%	100%	376.031.500	100%	386.221.137	100%	396.747.909	100%	407.625.335	100%	418.867.433	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 laporan	376.031.500	2 laporan	386.221.137	2 laporan	396.747.909	2 laporan	407.625.335	2 laporan	418.867.433	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 laporan	2 laporan	188.554.400	2 laporan	192.325.080	2 laporan	196.171.581	2 laporan	200.095.013	2 laporan	204.096.913	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15 laporan	5 laporan	88.963.000	5 laporan	93.411.675	5 laporan	98.082.258	5 laporan	102.986.371	5 laporan	108.135.690	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	98.514.100	1 laporan	100.484.382	1 laporan	102.494.070	1 laporan	104.543.951	1 laporan	106.634.830		
		2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA.	Persentase keselarasan RKP/RPJMD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA.	100%	100%	286.013.000	100%	260.365.810	100%	260.365.810	100%	328.291.010	100%	260.365.810			
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang bidang perekonomian		18 laporan	286.013.000	18 laporan	260.365.810	18 laporan	260.365.810	18 laporan	328.291.010	18 laporan	260.365.810			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		<p>Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian</p> <p>Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA</p>		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
				1 laporan		-		-		1 laporan		-			
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	18 laporan	18 laporan	112.523.000	18 laporan	112.548.030	18 laporan	112.548.030	18 laporan	112.548.030	18 laporan		
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0	1 laporan	139.817.000	1 laporan	147.817.780	1 laporan	147.817.780	1 laporan	147.817.780	1 laporan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	1	1 laporan	33.673.000	-	0	-	0	1 laporan	67.925.200	-	0	
		3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.	3. Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan wilayah	100%	100%	252.287.900	100%	516.757.500	100%	542.595.376	100%	569.725.143	100%	598.211.399		
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang infratruktur dan kewilayah	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Bidang Infrastruktur		5 laporan	252.287.900	5 laporan	516.757.500	5 laporan	542.595.376	5 laporan	569.725.143	5 laporan	598.211.399		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahana		0		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
		Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Kewilayahana		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Bidang Infrastruktur	11 laporan	5 laporan	124.707.900	5 laporan	147.630.000	5 laporan	155.011.500	5 laporan	162.762.075	5 laporan	170.900.178			
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 laporan	1 laporan	87.965.000	1 laporan	165.033.750	1 laporan	173.285.438	1 laporan	181.949.709	1 laporan	191.047.194			
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahian	0	0	-	1 laporan	141.330.000	1 laporan	148.396.500	1 laporan	155.816.325	1 laporan	163.607.141			
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahian	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahian	5 laporan	1 laporan	39.615.000	1 laporan	62.763.750	1 laporan	65.901.938	1 laporan	69.197.034	1 laporan	72.656.886			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					473.492.235		278.086.229		166.668.011		-	-	138.497.954			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangda dalam pembangunan	Percentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	27,78 %	100%	285.839.400	100%	278.086.229	-	-	-	100%	138.497.954			
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1 dokumen	69.970.300	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		-				-	-	-	-	-	-		
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0	1 dokumen	69.970.300	-	-	-	-	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
						2026		2027		2028		2029		2030			
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	2	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	-	-	1 dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-		
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan		Tersedianya rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		1 dokumen	215.869.100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksana Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0	1 dokumen	215.869.100	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Tersedianya dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan , dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		-	-	1 dokumen	78.086.229	-	-	-	1 dokumen	138.497.954			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	-		
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 doku men	-	1 dokumen	78.086.229	-	-	-	-	1 dokumen	87.657.254		
2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	50.840.700		
PROGRAM RISET DAN INOVASI		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait riset dan inovasi	0	100%	187.652.835	-	-	100%	166.668.011	-	-	-		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Invensi dan Inovasi	Tersedianya invenisi dan inovasi daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		1 Laporan	187.652.835	-	-	1 Laporan	166.668.011	-	-	-	-		
1	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	0	1 Laporan	187.652.835	-	-	1 Laporan	166.668.011	-	-	-	-		

4.2. URAIAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya pencapaian target-target pembangunan Kota Banda Aceh, BAPPEDA merencanakan berbagai program/kegiatan/sub kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung percepatan pencapaian target tersebut. Sesuai tupoksi, program-program prioritas yang direncanakan BAPPEDA terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan kota, koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan OPD dengan perencanaan kota, serta program terkait penelitian dan pengembangan inovasi daerah. Diantara sub kegiatan yang direncanakan BAPPEDA tersebut, 3 diantaranya terkait langsung dengan upaya pencapaian visi dan misi Kota Banda Aceh, yaitu Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, dan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan. Kedua sub kegiatan tersebut akan mengakomodir Pengadaan Peta Geospasial Kota Banda Aceh, pelaksanaan studi terkait Penataan Taman di Simpang Lima (Samping BTN), dan Kajian Pengembangan Wisata Air di Kota Banda Aceh. Berikut adalah daftar sub kegiatan pendukung prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA.

Tabel.4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Mendukung Visi-Misi Kepala Daerah
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Mendukung Visi-Misi Kepala Daerah
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Mendukung Visi-Misi Kepala Daerah

4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu organisasi/badan sesuai target yang telah ditetapkan dalam menjalankan tupoksinya. IKU Renstra BAPPEDA sesuai arahan dalam Inmendagri Nomor 2 tahun 2017 meliputi indikator dari tujuan dan sasaran Renstra. Berikut adalah IKU BAPPEDA periode 2025 – 2029 berikut target capaianya selama 5 (lima) tahun.

Tabel.4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	40	43	46	48	50	60	
3	SAKIP Komponen Perencanaan	Indeks	21,43	21,63	21,83	22,00	22,23	22,43	
4	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	100	100	100	100	100	100	

Penghitungan IKU BAPPEDA setiap tahunnya merujuk pada penilaian yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan. Untuk Predikat SAKIP dan SAKIP Komponen Perencanaan, dilihat dari penilaian yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di setiap tahunnya. Sedangkan nilai Indeks Inovasi Daerah merujuk pada hasil penghitungan resmi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). IKU terakhir, yaitu Persentase

Kebijakan Berbasis Bukti, akan dihitung secara mandiri oleh BAPPEDA dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan berbasis penelitian dan riset yang diterapkan}}{\text{Jumlah penelitian dan riset yang direkomendasikan}} \times 100\%$$

Selain IKU tersebut diatas, BAPPEDA juga memiliki beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dirangkum dari daftar indikator kinerja bidang perencanaan seperti yang tertuang dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. IKK digunakan untuk memantau atau mengevaluasi pelaksanaan proses operasional kinerja BAPPEDA dalam mendukung pencapaian IKU. Berikut adalah IKK Renstra BAPPEDA Kota Banda Aceh:

Tabel. 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAPPEDA

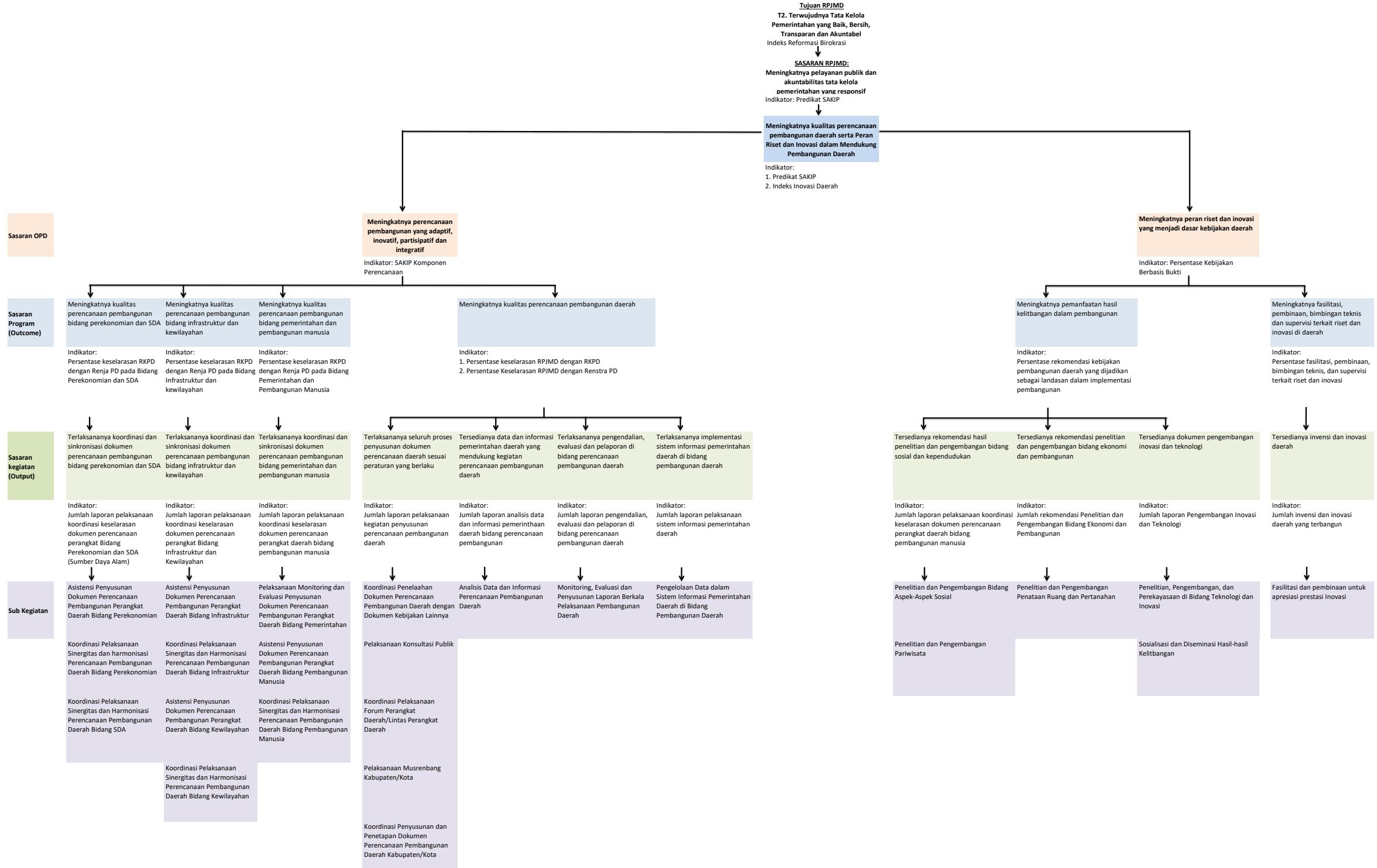
NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

BAB V. PENUTUP

Renstra BAPPEDA periode 2025 – 2029 merupakan perencanaan jangka menengah atau perencanaan strategis yang berisikan tujuan dan sasaran berikut strategi serta arah kebijakan dengan target-target kinerja yang terukur. Dokumen ini disusun sesuai panduan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Dokumen ini merujuk pada dokumen RPJMD dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja jangka pendek BAPPEDA disetiap tahunnya.

Total anggaran BAPPEDA dalam Renstra 2025 – 2029 adalah sebesar 70.503.260.449 rupiah dengan rincian 23,62% untuk pelaksanaan program bidang perencanaan serta 1,50% untuk program bidang penelitian dan pengembangan. Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai 4 (empat) IKU yang akan mengukur kinerja BAPPEDA, yaitu: Predikat SAKIP, Indeks Inovasi Daerah, SAKIP Komponen Perencanaan, serta Persentase Kebijakan Berbasis Bukti. Target-target kinerja dalam dokumen ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA khususnya dalam mendukung program-program prioritas daerah di bidang perencanaan pembangunan serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi.

Banda Aceh, 4 Desember 2025
KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
ROSDI, S.T, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 200112 1 004





Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>